



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Jalan Rohana Kudus - P A I N A N**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 900/ 08 /BKPol-PS/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2021 – 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 – 2026, perlu ditetapkan indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026, dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahapan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 104 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:
1. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
  2. Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
  3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
  4. Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
  5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksana Program dan Kegiatan Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 23 Januari 2023

Kepala Badan,  
  
HARDI DARMA PUTRA, S.H.M.Si  
Pembina Tk. (IV/b)  
NIP. 19670901 198602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 900/ 08 /BKPol-PS/2023

Tanggal : 23 Januari 2023

Tentang : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

I. REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021 – 2026

No.	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target						Sumber data dan Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai RB Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tanpa Satuan	N/A	N/A	B (65)	B (65)	B (65)	B (65)	Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tanpa Satuan	BB (71,8)	BB (72)	A (81)	A (81,2)	A (81,5)	A (82)	Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	SIMANTAP PESSEL ( Sistem Informasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Pesisir Selatan )	Tanpa Satuan	N/A	100	100	100	100	100	Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenram dan Dinamis	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik	$\frac{\sum \text{potensi konflik yang terdeteksi, terbahas dan tertangani dalam rakor kewaspadaan dini masyarakat (KDM)}}{\sum \text{konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$	Persen	80	80	80	100	100	100	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
				Cakupan Peningkatan Pendidikan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Politik	$\frac{\sum \text{Kelompok masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik}}{\sum \text{Kelompok masyarakat Sasaran Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik}} \times 100\%$	Persen	N/A	N/A	30	40	60	62	Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas dan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

II. Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

PEJABAT : ESSELON II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	N/A	N/A	65 (B)	65 (B)	65 (B)	65 (B)
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (71.8)	BB (72)	A (81)	A (81.2)	A (81.5)	A (82)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	N/A	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik	%	80	80	80	80	100	100
		Cakupan Peningkatan Pendidikan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Politik	%	N/A	N/A	30	30	35	35

PEJABAT : ESSELON III

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Nilai Evaluasi Sakip Badan Kesbangpol	Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol	Tanpa Satuan	BB (71.8)	BB (72)	A (81)	A (81.2)	A (81.5)	A (82)
2.	Meningkatnya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Kepegawaian	Tanpa Satuan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas
3.	Meningkatnya Inovasi	Jumlah Inovasi Per Bidang (1)	Inovasi	N/A	1	3	3	3	3
4.	Meningkatkan Peran Forum Strategis Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik	Persentase Rekomendasi Penanganan Konflik yang ditindak Lanjuti	%	80	80	80	80	100	100
5.	Meningkatnya Fasilitasi tentang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Kali	N/A	2	2	3	4	5
6.		Persentase Penurunan Kasus	%	N/A	3	2	2	1	1

	Menurunnya Penyakit Masyarakat	Penyalahgunaan Narkoba							
		Persentase Penurunan Kasus Kenakalan Remaja	%	N/A	N/A	3	2	1	1
7.	Meningkatnya Peran Lembaga Politik/Ormas untuk Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diterima dari Perwakilan Partai Politik	%	N/A	N/A	55	60	60	65

#### KINERJA OPERASIONAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	Dokumen	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)
2.	Meningkatnya Kualitas Data Kinerja Badan kesbangpol	Jumlah Dokumen Data Sektoral yang dikelola	Dokumen	N/A	3	3	4	4	5
3.	Meningkatnya Layanan Kepegawaian	Persentase Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100

4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Surat Menyurat	Persentase Layanan Surat Menyurat Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100
5.	Meningkatnya SDM Kesbangpol	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri	Kali	N/A	N/A	1	1	1	1
6.	Informasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Data Konflik	Konflik	5	10	10	10	10	10
7.	Meningkatnya Masyarakat yang Mengikuti Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Orang	N/A	500	500	500	500	500
8.	Meningkatkan Fasilitasi Pencegahan dan Pengawasan PEKAT	Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan Pekat	Kali	N/A	1	2	2	3	3
		Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pekat	Kali	N/A	1	1	1	1	1
9.	Meningkatkan Efektifitas Kelembagaan Demokrasi	Persentase Lembaga Politik (Partai/Ormas) yang sesuai dengan Regulasi	%	80	80	80	80	85	85

### III. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

Agar seluruh stakeholder Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

#### 1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	: Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah sebagai Assesor sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB no 26 tahun 2020.
Formula	: Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah
Sumber Data	: Laporan hasil penilaian Reformasi Birokrasi
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### 2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	: Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formula	: Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber Data	: Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### 3. Nilai Kematangan Inovasi PD

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	: Nilai kematangan inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri.
Formula	: Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber Data	: Aplikasi pengentrian kriteria inovasi dari Kemendagri
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### 4. Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	: Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana

dalam situasi dan peristiwa baik sebelum pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Formula : 
$$\frac{\sum \text{potensi konflik yang terdeteksi, dibahas dan tertangani dalam rakor kewaspadaan dini masyarakat (KDM)}}{\sum \text{konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$$

Sumber Data : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### 5. Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik

Level dalam Resntra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik

Formula : 
$$\frac{\sum \text{Kelompok masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik}}{\sum \text{Kelompok masyarakat Sasaran Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik}} \times 100\%$$

Sumber Data : Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama; Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### 6. Nilai Komponen Perencanaan pada Evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol

Level dalam Resntra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Nilai komponen perencanaan pada evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol merupakan nilai komponen perencanaan yang terdapat pada LHE LKj.

Formula : Nilai komponen perencanaan pada LHE LKj

Sumber Data : Inpektorat Daerah

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### 7. Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Kepegawain

Level dalam Resntra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Tingkat kepuasan terhadap layanan kepegawain merupakan level kepuasan terhadap layanan kepegawain pada Badan Kesbangpol

Formula : Tingkat perhitungan rata-rata kepuasan terhadap layanan kepegawain

Sumber Data : Bagaian Umum Kepegawain

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### 8. Jumlah Inovasi Per Bidang (1)

Level dalam Resntra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Banyaknya inovasi yang dihasilkan oleh bidang

Formula : Jumlah inovasi

Sumber Data : Bidang pada Badan Kesbangpol  
Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

9. Persentase Rekomendasi Penanganan Konflik yang ditindak Lanjuti

Level dalam Resntra : Kinerja Taktikal  
Definisi Oprasional : Persentase konflik yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol

Formula : 
$$\frac{\text{Jumlah Konflik yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Konflik}} \times 100\%$$

Sumber Data : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

10. Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Level dalam Resntra : Kinerja Taktikal  
Definisi Oprasional : Banyaknya Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Formula : Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dan partai politik

Sumber Data : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

11. Persentase Penurunan Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Level dalam Resntra : Kinerja Taktikal  
Definisi Oprasional : Merupakan Persentase Penurunan Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Formula : 
$$\frac{(\text{Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun Berjalan}) - (\text{Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun Lalu})}{(\text{Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun Lalu})} \times 100\%$$

Sumber Data : Polres Pesisir Selatan

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

12. Persentase Penurunan Kasus Kenakalan Remaja

Level dalam Resntra : Kinerja Taktikal  
Definisi Oprasional : Merupakan Persentase Penurunan Kasus Kenakalan Remaja

Formula : 
$$\frac{(\text{Jumlah Kasus Kenakalan Remaja Tahun Berjalan}) - (\text{Jumlah Kasus Kenakan Remaja Tahun Lalu})}{(\text{Jumlah Kasus Kenakalan Remaja Tahun Lalu})} \times 100\%$$

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

13. Persentase Aspirasi Masyarakat yang diterima dari Perwakilan Partai Politik

Level dalam Resntra : Kinerja Taktikal  
Definisi Oprasional : Merupakan Aspirasi Masyarakat yang diterima dari Perwakilan Partai Politik

Formula : 
$$\frac{\text{Jumlah Aspirasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Aspirasi yang diajukan Masyarakat}} \times 100\%$$

Sumber Data : Sekwan dan Bappedalitbang

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

14. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu
- Level dalam Resntra : Kinerja Operasional
- Definisi Oprasional : Merupakan waktu yang harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait
- Formula : Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari instansi terkait
- Sumber Data : Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
- Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15. Jumlah Dokumen Data Sektoral yang dikelola
- Level dalam Resntra : Kinerja Operasional
- Definisi Oprasional : Banyaknya Dokumen Data Sektoral yang dikelola
- Formula : Jumlah Dokumen Data Sektoral yang dikelola
- Sumber Data : Bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16. Persentase Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu
- Level dalam Resntra : Kinerja Operasional
- Definisi Oprasional : Merupakan dokumen segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan Kepegawaian yang disusun Tepat Waktu
- Formula : 
$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Keseluruhan Dokumen Kepegawaian}} \times 100\%$$
- Sumber Data : Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
- Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17. Persentase Layanan Surat Menyurat Sesuai SOP
- Level dalam Resntra : Kinerja Operasional
- Definisi Oprasional : Merupakan acuan penerapan langkah-langkah alur surat masuk baik internal maupun eksternal secara tertib dan teratur dalam layanan Surat menyurat
- Formula : 
$$\frac{\text{Jumlah Layanan Surat Menyurat Sesuai SOP}}{\text{Jumlah Layanan Surat Menyurat}} \times 100\%$$
- Sumber Data : Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
- Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
18. Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri
- Level dalam Resntra : Kinerja Operasional
- Definisi Oprasional : Pelatihan kantor sendiri dilakukan untuk peningkatan kapasitas sdm pegawai Badan Kesbangpol.
- Formula : Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri
- Sumber Data : Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
- Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19. Jumlah Data Konflik
- Level dalam Resntra : Kinerja Operasional
- Definisi Oprasional : Merupakan kegiatan pendataan pengumpulan data konflik yang ada di Pesisir Selatan
- Formula : Jumlah Data Konflik

Sumber Data : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

20. Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Level dalam Resntra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Merupakan Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Formula : Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Sumber Data : Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

21. Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan Pekat

Level dalam Resntra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan Pekat

Formula : Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan Pekat

Sumber Data : Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

22. Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pekat

Level dalam Resntra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pengawasan Pekat

Formula : Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pekat

Sumber Data : Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

23. Persentase Lembaga Politik (Partai/Ormas) yang Sesuai dengan Regulasi

Level dalam Resntra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Merupakan Partai/Ormas yang terdaftar di Kemenkumham dan sesuai dengan standar yang ada.

Formula : 
$$\frac{\text{Jumlah Partai dan Ormas yang sesuai dengan regulasi}}{\text{Jumlah Partai dan Ormas yang ada di pesisir Selatan}} \times 100\%$$

Sumber Data : Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



HARDI DARMA PUTRA, S.H., M.Si.  
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670901 198602 1 001